GUNTINGAN BERITA

Surat Kabar : **kompas** **Tanggal** : **14 mei 2007**

Subyek : **Pejuang Lingkungan** **Hari** : **Senin**

Halaman : **12**

Pejuang lingkungan

Penerima Kalpataru Harapkan Perhatian Konkret Pemerintah

Jakarta, Kompas - Para penerima penghargaan kalpataru yang hingga kini masih berada di lini terdepan menangani persoalan lingkungan berharap adanya perhatian pemerintah secara konkret dan konsisten. Perhatian bukan untuk mereka, tetapi bagi masa depan lingkungan.

Pernyataan tersebut mereka ungkapkan di sela-sela sarasehan lingkungan para penerima kalpataru yang dibuka mantan Presiden Megawati Soekarnoputri di Cimanggis, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

"Kami tak ingin dihargai berlebihan, tetapi tolong pemerintah perhatikan bagaimana lingkungan terus hancur," kata Semuel Mansmor (65), penerima kalpataru kategori perintis lingkungan tahun 2004 asal Biak Timur, Biak Numfor, Papua. Purnawirawan polisi itu dikenal sebagai tokoh pejuang melawan pengeboman ikan, kini rajin menyuluh warga pesisir di tengah keterbatasan fasilitas dan transportasi.

Demikian pula halnya Mada Hendrikus (51), polisi hutan penerima kalpataru kategori pengabdi lingkungan tahun 2002 asal Bajawa, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serius menjaga keberlanjutan lingkungan yang kian hancur.

"Di Jakarta selalu bicara politik saja, tidak pernah memikirkan bagaimana lingkungan sangat kritis. Nafsu menjaga lingkungan besar, tapi tenaga kurang," kata satu-satunya polisi hutan yang menjaga kawasan cagar alam Watu Ata, NTT, ini.

Tidak satu pun para penerima kalpataru yang ditemui mengaku bekerja di lapangan berfasilitas cukup. Meskipun miskin sarana dan prasarana, mereka mengaku akan tetap mengabdi pada upaya pelestarian lingkungan.

Kepada 110 penerima kalpataru (periode 1980-2006) yang hadir dalam pembukaan malam itu, Megawati menyatakan bahwa dirinya prihatin dengan kondisi lingkungan dan ingin mewajibkan para kepala daerah dari PDI Perjuangan meniru semangat mereka melalui program lingkungan di daerah. "Janganlah hanya memerhatikan persoalan politik. Persoalan lingkungan pun mendesak diatasi," kata dia.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sonny Keraf yang bertindak selaku penyelenggara mengatakan, sarasehan tersebut jauh dari urusan politik. Acara itu disebutnya sebagai "utang yang tertunda ketika Megawati menjabat sebagai presiden". (GSA)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup